

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam Indonesia meliputi kekayaan hasil hutan, kekayaan hasil laut, dan kekayaan hasil pertambangan. Seperti yang diketahui bahwa pertambangan merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut maka terdapat adanya kewajiban divestasi pada penanaman modal asing sebagai pelengkap modal lokal bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pembicaraan tentang divestasi saham khususnya divestasi saham pertambangan mulai ramai didiskusikan oleh para ahli dan juga Pemerintah sejak timbulnya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Divestasi saham adalah pengalihan sejumlah saham dari penanaman modal asing kepada pihak lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun lelang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, Pengaturan mengenai divestasi saham terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia khususnya di bidang pertambangan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sedangkan pada saat ini peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bersama dengan Peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa divestasi saham antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah berdasarkan Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 menyatakan bahwa Pembelian 7% saham PT NNT merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara sehingga kegiatan tersebut harus tunduk pada konstitusi. Pembelian saham PT NNT dapat dilakukan sepanjang dana pembelian saham tersebut telah tertuang dalam APBN sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehingga dalam hal ini Pemerintah seharusnya telah menuangkan rencana pembelian divestasi saham PT NNT dalam APBN dan memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Divestasi, PT Newmont Nusa Tenggara.